

BAB I

PENDAHULUAN

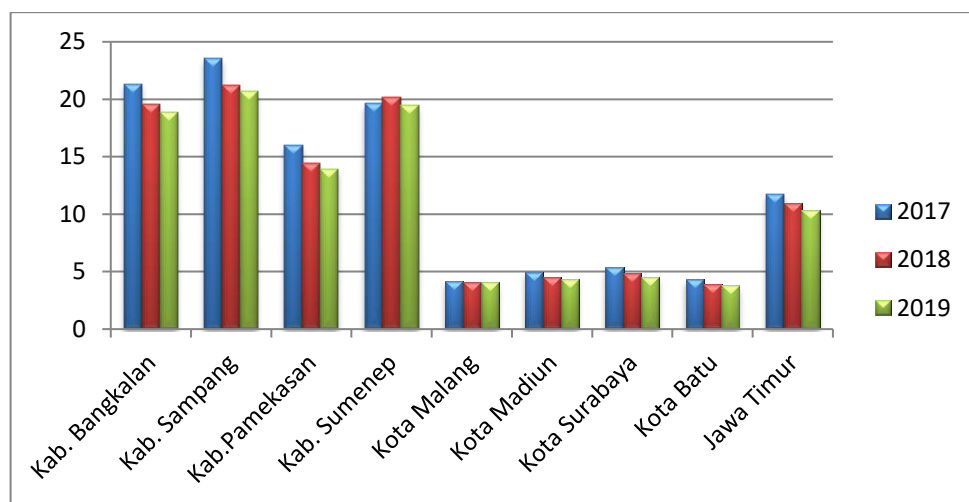
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan efisiensi meningkatkan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi negara berkembang pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir suatu negara. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sudah dijelaskan tujuan nasional salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam hal ini indikator tercapainya masyarakat yang sejahtera dapat ditunjukkan dengan tingkat kesehatan, pendidikan, kependudukan, pendapatan penduduk, kemiskinan, konsumsi ketenagakerjaan dan sosial lainnya (BPS, 2019). Menurut Rumaharbo (2014) menyatakan sasaran pembangunan salah satunya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, fenomena kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks terhadap pembangunan. Artinya ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya sesuai pendapatan yang dimiliki seperti minimnya akses kebutuhan makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, kebutuhan akan air bersih, sanitasi dan kebutuhan kebutuhan lainnya, sehingga kemiskinan ini menjadi masalah agenda rutin dalam setiap tahapan pembangunan suatu daerah atau suatu negara. Teori perangkap kemiskinan atau *the vicious circle of poverty* yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan kemiskinan yaitu serangkaian permasalahan atau kekuatan yang saling berpeengaruh sehingga menyebabkan keadaan suatu negara tetap miskin dalam mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Permasalahan dalam Negara miskin yaitu ketidakmampuan individu dalam memperoleh pendapatan yang rendah

sehingga tabungan juga ikut rendah, dan tentu modal yang digunakan untuk produksi juga kecil hal ini berakibat pada produksi yang rendah. Kualitas produksi yang rendah otomatis menyebabkan konsumsi rendah dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar individu seperti sandang, papan, pangan serta sarana dan prasarana juga rendah selain itu tingkat kesehatan juga akan rendah hal ini menyebabkan rendahnya kinerja suatu individu. Apabila kinerja suatu individu rendah ini akan menghasilkan produktivitas yang kurang unggul bersaing karena kemampuan pendidikan atau pengetahuan yang rendah. Daya beli terhadap pendidikan dan informasi rendah sehingga pemasukan suatu individu kecil.

Indonesia yang merupakan Negara berkembang berdasarkan Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 mencapai 230 juta jiwa sedangkan pada tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini tentu akan berdampak pada masalah masalah pembangunan seperti pada masalah meningkatnya angka kemiskinan. Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan menjadi Negara terpadat di dunia yang dilansir dari data *The United States Census Bureau* 2020, membutuhkan pembangunan yang baik sehingga akan menciptakan perekonomian yang baik dan masyarakat tentu akan mencapai sejahtera, persentase penduduk miskin pada semester II (September) tahun 2019 mencapai 9.22% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24.78 juta jiwa yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia baik di wilayah Kab/Kota maupun perkotaan dan perdesaan (BPS, 2020).

Daerah di Jawa Timur jumlah dan presentase penduduk miskin menurut kabupaten/ kota tahun 2019 semester II (september) mencapai 10.20 % dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/ kota di provinsi jawa timur mencapai 40,56 ribu jiwa. Jika dibandingkan antara kabupaten dan kota yang ada di jawa timur kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah kabupaten dibandingkan dengan daerah kota. Bahkan di jawa timur kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin yang terbanyak terjadi pada 2 kabupaten di Madura yaitu Sampang dan Sumenep. Berikut ini tabel perbandingan kemiskinan kabupaten yang ada di Madura dengan 4 kota di Jawa Timur :



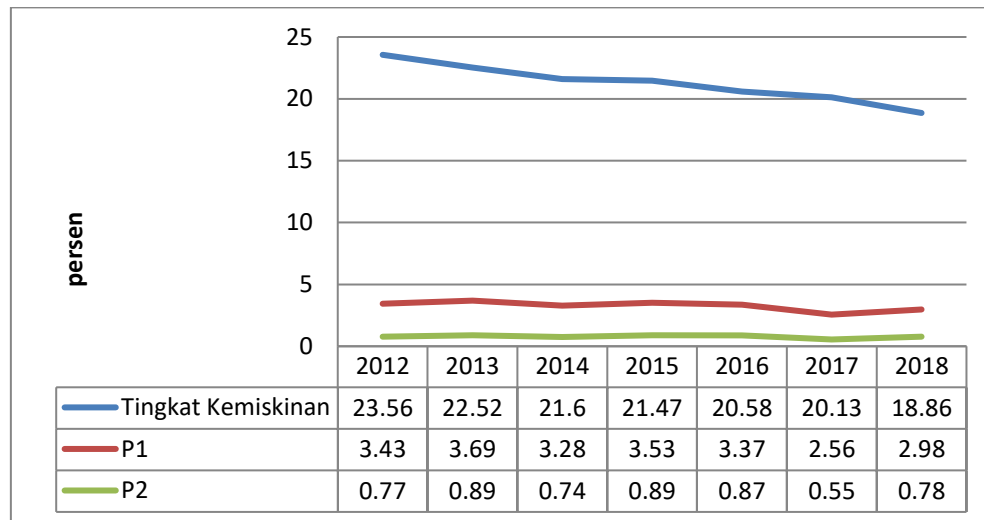
Gambar 1. 1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin 4 Kabupaten di Madura dan 4 kota di Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2019)

Grafik diatas merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah yang terjadi di Jawa Timur yang menunjukkan bahwasannya kemiskinan tertinggi dan banyak terjadi di daerah kabupaten dibandingkan dengan daerah kota di Jawa Timur. Bahkan kemiskinan di

4 Kabupaten di Madura jauh lebih tinggi mencapai 4-5 kali lipat jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di daerah kota Jawa Timur.

Madura terletak disebelah timur laut Provinsi Jawa Timur luasnya hampir mencapai 5.168 Km² dengan kepadatan rata rata penduduk sebesar 719,97 jiwa/Km² tahun 2019 yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Berdasarkan grafik diatas kabupaten yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi pada Kabupaten Sampang kemudian diikuti oleh Kabupaten Sumenep dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,71 persen dan 19,48 persen. Dua kabupaten di Madura ini merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa Timur bahkan persentase kemiskian di Madura sangat tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Jawa Timur. Sedangkan jumlah penduduk miskin terjadi pada Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sampang dan Sumenep merupakan penyumbang terbesar tingkat kemiskinan di Madura dibandingkan dengan 2 kabupaten lainnya. Hal ini lah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di Madura karena Madura sendiri memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Berikut ini perkembangan tingkat kemiskinan di Madura sejak tahun 2012 sampai 2019 :



Gambar 1. 2 Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan di Madura
 Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) Data Diolah

Data diatas merupakan tingkat kemiskinan yang terjadi di Madura tahun 2012-2018 yang diikuti dengan tingkat kedalaman (P1) dan tingkat Keparahan (P2) kemiskinan. Tingkat Kemiskinan yang terjadi pada 4 kabupaten di Madura meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik. Gambar 1.2 merupakan perkembangan tingkat kemiskinan di Madura yang mengalami penurunan cukup signifikan dimana pada tahun 2012 tingkat kemiskinan mencapai 23.56 % mengalami penurunan tiap tahunnya sebesar 4,7 %. Meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan di Madura namun persentase kemiskinan di Madura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur bahkan selisih perbandingannya sangat jauh yaitu sebesar 10,48 persen pada tahun 2012. Perkembangan tingkat kemiskinan di Madura mengalami penurunan diikuti dengan persentase tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Menurunnya tingkat kemiskinan di Madura karena jumlah penduduk memiliki rata rata pengeluaran diatas garis

kemiskinan yang sudah ditetapkan, dimana garis kemiskinan di Madura lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur. Sehingga kemiskinan di Madura cenderung lebih tinggi penurunnya dibandingkan dengan Jawa Timur karena Jawa Timur sendiri memiliki garis kemiskinan yang cenderung tinggi yang menyebabkan banyak penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan bahkan dilihat dari kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata rata kesenjangan pada pengeluaran dari masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menunjukkan apabila semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh dari rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari banyaknya penduduk miskin, tetapi juga dilihat dari bagaimana atau seberapa besar jarak rata rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selain itu penting juga untuk melihat tingkat kedalaman (P1) dan keberagaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2). Di Madura sendiri tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat dari tahun 2017-2018 semakin tinggi sehingga menyebabkan kondisi ekonomi penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan di Madura yang merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang terjadi semakin tinggi. Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwasannya keparahan kemiskinan (P2) berfluktuatif cenderung meningkat yang artinya terjadi ketimpangan pada pengeluaran penduduk miskin. Selain itu daerah Madura meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan namun secara jumlah dan persentase kemiskinan masih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan di

jawa timur serta di daerah Madura juga belum mampu menempatkan sebagai daerah yang unggul dan bersaing dengan daerah lain. Sehingga perlu indikator yang jelas dalam mengukur kemiskinan khususnya di Madura.

Instrumen dalam mengurangi kemiskinan yang ada pada masyarakat adalah pendidikan. Menurut IPM (2007) menyebutkan kemiskinan berhubungan dengan semakin kecilnya kesempatan yang memperluas pilihan manusia (*enlarging choice*) terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya. Menurut Kodar (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat mampu menggunakan faktor produksi dan teknologi sehingga produktivitas meningkat yang berakibat naiknya pendapatan perkapita dan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. Peran utama dalam meningkatkan kapasitas produksi sehingga tercipta pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan melalui teknologi modern yaitu dengan melalui kemampuan penduduk dalam menjalankan teknologi tersebut dengan pengetahuan atau pendidikan yang terampil. Dengan hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sistem pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan juga kebutuhan yang paling asasi bagi semua masyarakat karena dengan pendidikan kemampuan masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan (Suryandari, 2017). Selain itu untuk melihat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan penduduk, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan suatu penduduk semakin bagus kualitas sumber daya manusia. Keterkaitan pendidikan dan kemiskinan dapat membantu seseorang berkembang dari ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki dan mampu keluar dari kemiskinan (Suryawati, 2005).

Berikut ini perkembangan tingkat pendidikan atau penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan penduduk yang buta huruf di Madura periode tahun 2016-2019.

Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Melek Huruf di Madura Tahun 2016-2019 (Persen)

Tahun	Angka Partisipasi Kasar			Angka Melek Huruf
	SD	SMP	SMA	
2016	31.50	31.14	31.14	2.4
2017	30.64	31.77	25.47	3.3
2018	26.18	30.36	30.49	3.1

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan dimulai dari SD setiap tahunnya mengalami penurunan artinya penduduk Madura yang memiliki ijazah SD semakin menurun perkembangnya. Sedangkan pada penduduk yang memiliki pendidikan di tingkat SMP mengalami peningkatan dan di tingkat SMA perkembangnya pada setiap tahun mengalami penurunan. Dapat dilihat juga pada angka melek huruf tiap tahun mengalami penurunan yang artinya masyarakat di Madura memiliki tingkat pendidikan yang semakin baik karena dapat menurunkan angka melek huruf pada penduduk di Madura tahun 2016-2019. Namun yang menjadi permasalahan di Madura pada tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan SMP bukan pada tingkat pendidikan SMA padahal pemerintah sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun yang merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019 dan setara dengan SMA. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan SDM yang baik dan berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan merupakan investasi

jangka panjang apabila dilakukan secara merata baik pada masyarakat berpenghasilan tinggi maupun rendah maka akan mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan yang tinggi maka keterampilan yang dimiliki juga baik sehingga perusahaan akan mendapat hasil atau output yang baik dengan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil serta perusahaan akan memberikan gaji atau upah yang tinggi dan pendapatan suatu individu tersebut meningkat. Melalui sumber daya manusia yang berkualitas yang diperoleh dari tingkat atau sistem pendidikan penduduk tentunya akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan tentunya menguasai teknologi modern sehingga mampu mengurangi permasalahan kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Menurut Todaro (2006) tingkat kemiskinan dapat dikurangi melalui penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Tingkat kemiskinan dapat dikurangi sehingga kesejahteraan serta kemakmuran suatu penduduk dapat dilihat seberapa besar tingkat pendapatannya yang diperoleh oleh pekerja. Menurut Setiawati (2017) pendapatan penduduk mencapai tahap maksimum pada saat tingkat penggunaan *full employment* atau tenaga kerja penuh terwujud artinya tidak ada pengangguran, dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terserap meningkat maka dapat membantu menggerakkan perekonomian suatu daerah. Dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan misalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penyerapan tenaga kerja, persentase kesempatan kerja serta distribusi pada lapangan pekerjaan. Peningkatan pada penyerapan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Dengan pendapatan yang tinggi otomatis

penduduk memiliki peningkatan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga hal ini kemiskinan menurun. Namun apabila penyerapan tenaga kerja ini tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan maka terdapat masalah pada kualitas lapangan kerja seperti kurangnya upah maupun jaminan sosial pekerja. Berikut ini perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Madura tahun 2017-2019.

Tabel 1. 2 keadaan Ketenagakerjaan di Madura Tahun 2017-2019

No	Jenis Kegiatan	Tahun (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Penduduk Berumur >15 Tahun	2.913.306	2.946.858	2.980.294
2	Angkatan Kerja	2.053.650	2.044.648	1.138.216
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70.35	69.26	68.17
	Pengangguran Terbuka	631.67	618.02	648.34
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.17	3.09	3.28
3	Bukan Angkatan Kerja	859.656	902.210	937.973
	Sekolah	253.375	272.209	160.688
	Mengurus Rumah Tangga	475.093	488.469	518.146
	Lainnya	131.188	141.532	160.688

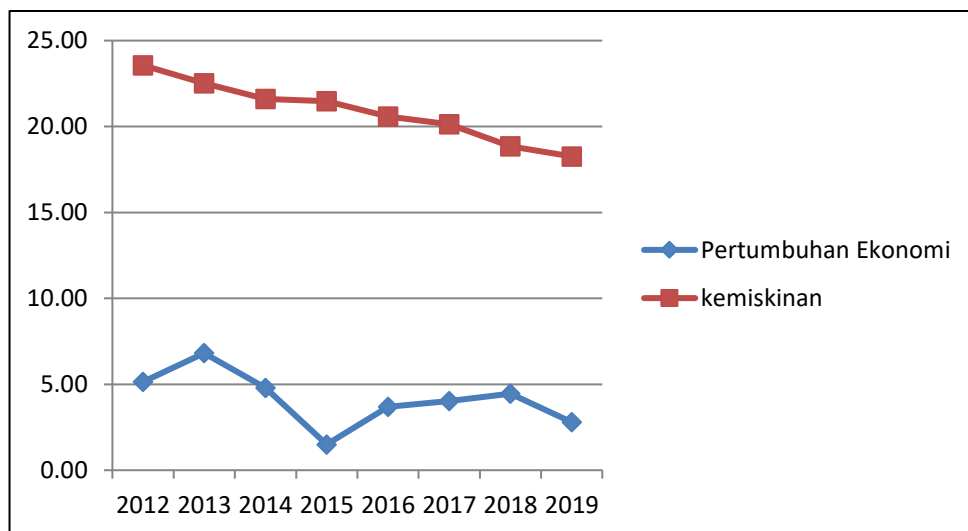
Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Madura dengan 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sejak tahun 2017-2019 menunjukkan bahwasanya tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebesar 70.35% kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 69.26% dan pada tahun berikutnya turun kembali menjadi 68,17% penurunannya sebesar 1.09%. Menurunnya TPAK ini diikuti oleh penurunan angkatan kerja di Madura tiap tahunnya. Selain itu dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di Madura 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dimana tahun 2017

sebesar 3.17 dan tahun 2019 menjadi 3.28. Peningkatan pengangguran ini menunjukkan tenaga kerja terserap masih rendah di lapangan kerja. Dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas semakin meningkat setiap tahunnya. Penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga terbatasnya kesempatan kerja. Hal ini terjadi pada daerah di Madura sehingga pengangguran meningkat. Menurut Mankiw (2000) rendahnya upah pekerja akan berpengaruh pada meningkatnya pengangguran. Selain itu upah juga penting dalam ketenagakerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Upah berkaitan dengan pengangguran. Semakin rendah upah yang diterima pekerja maka pengangguran semakin meningkat karena masyarakat cenderung untuk tidak bekerja karena upah yang didapatkan juga rendah. Namun kenaikan upah menyebabkan permintaan tenaga kerja rendah. Akhirnya terjadi peningkatan tenaga kerja yang tidak terserap. Pengangguran meningkat akibatnya pendapatan penduduk tidak ada dan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi akibat hal ini terjadi jumlah penduduk miskin meningkat. Permasalahan diatas terjadi di Madura yaitu peningkatan tenaga kerja yang tidak terserap karena pengangguran meningkat sehingga jumlah penduduk miskin di Madura juga meningkat. Dengan pengangguran yang meningkat produktivitas menurun yang pada akhirnya berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Madura.

Teori pembangunan menjelaskan kemiskinan akan teratasi melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menunjukkan perekonomian suatu wilayah semakin baik yang didapat dari indicator laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Kegiatan produksi barang jasa yang meningkat di suatu

daerah memperlihatkan kesejahteraan suatu penduduk serta keberhasilan pembangunan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu suatu pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi di tahun tertentu. Apabila PDRB di suatu daerah meningkat maka penerimaan suatu daerah tersebut juga meningkat. Penerimaan yang meningkat berarti pemenuhan kebutuhan di suatu daerah terpenuhi sehingga PDRB ini dapat mempengaruhi kemiskinan. Namun masih banyak penduduk suatu daerah yang tidak merasakan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan seperti ini terjadi di daerah Madura. Berikut ini laju pertumbuhan ekonomi diikuti dengan tingkat kemiskinan di Madura tahun 2012-2019 (persen).



Gambar 1. 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Madura Tahun 2012-2019 (persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) Data Diolah

Perkembangan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan tingkat kemiskinan di Madura (grafik 1.3) pada Periode 2012-2019 dimana saat laju pertumbuhan ekonomi turun tingkat kemiskinan naik begitupun sebaliknya. Pada

saat laju pertumbuhan ekonomi naik tingkat kemiskinan turun hal ini terjadi pada tahun 2013 kemiskinan menurun dari tahun. Akan tetapi apabila melihat perkembangan dari pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dimana penurunan tingkat kemiskinan di Madura tidak diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi artinya perkembangan pertumbuhan ekonomi di Madura cenderung berfluktuatif menurun. Bahkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Madura mengalami penurunan sebesar 1,8 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Menurut Todaro (2003) komponen utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah/ wilayah yaitu akumulasi modal seperti investasi yang meliputi tanah, modal manusia/ SDM. Kemudian pertumbuhan penduduk meliputi penambahan pada angkatan kerja. Selanjutnya kemajuan teknologi. Salah satunya melalui capital human / modal manusia yang baik sehingga pengetahuan dan perkembangan SDM berkualitas yang dilihat dari tingkat pendidikannya dengan pendidikan yang tinggi mampu menunjukkan kemampuan suatu penduduk mampu menjalankan teknologi khususnya pada tenaga kerja dengan kemampuan pengetahuannya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan menghasilkan output / produktivitas yang tinggi dan berkualitas. Kemampuan meningkatkan produksi barang maupun jasa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan meningkatkan Pertumbuhan penduduk akan semakin memperbesar ukuran pasar domestik. Menurut Pamuji (2019) pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap mempengaruhi kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Setiawati (2017) faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan suatu daerah diantaranya jumlah penduduk yang meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat yang dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, tingkat dan jenis pendidikan, tingkat pengangguran meningkat, bencana alam, kesempatan kerja, tingkat upah, teknologi dan faktor lainnya.

Kemiskinan di Madura masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa timur bahkan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur terjadi di kabupaten Sampang kemudian Kabupaten Sumenep yang merupakan dua kabupaten yang ada di Madura. Dilihat dari faktor tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah menengah pertama (SMP) dibandingkan dengan Tingkat pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) mengidentifikasi bahwasanya Tingkat pendidikan di Madura masih rendah sedangkan pada keadaan ketenagakerjaan di Madura dimana tenaga kerja terserap masih rendah karena meningkatnya jumlah pengangguran di Madura. Pengangguran yang meningkat menyebabkan produksi barang dan jasa menurun akibatnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi melihat permasalahan ini terjadi di Madura yaitu laju pertumbuhan PDRB cenderung berfluktuasi menurun kebawah. Penurunan kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto. Dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum mampu menurunkan kemiskinan di Madura. Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penyerapan Tenaga kerja serta Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Madura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Madura?
2. Bagaimana Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Madura?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Madura
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Madura
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Madura

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan yang dilihat dari tingkat pendidikan,

penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Madura. Manfaat penelitian dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Manfaat Penulis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan tentang teori yang sudah ada dengan keadaan di lapangan yang terjadi khususnya dalam penurunan tingkat kemiskinan di Madura

2. Manfaat akademik

- a. Dapat memberikan manfaat terkait perkembangan ilmu pengetahuan juga informasi lebih lanjut kepada penelitian selanjutnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui indikator indikator yang mendukung dan sesuai teori yang sudah ada.

3. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam menurunkan kemiskinan dan mampu keluar dari garis kemiskinan
- b. Dapat mengevaluasi kepada Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan di Madura dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan di Madura.